



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **LENI SUKOWATI**
2. Jabatan : **BENDAHARA**
3. NHK : **801757**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.245.945.000**

1. Tanah Seluas 990 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 15.345.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/50 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 558.600.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 896 m2/96 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 672.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 263.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. LAINNYA, POLIGON MTB Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
6. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 79.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	44.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.632.445.000
III. HUTANG	Rp.	210.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.422.445.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.